

# Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme sebagai Upaya Menanggulangi Peperangan Asimetris: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah

**Galang Setyawan Aji**  
**Mochammad Afifuddin**  
**Ahmad G. Dohamid**

*Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia*  
*E-mail Korespondensi : Setyawanajigalang@gmail.com*

---

## **ABSTRACT**

*This research aims to find out about the policies of the Central Java Provincial Government in spreading Radicalism which is important in asymmetric warfare. Asymmetric warfare can occur due to technological advances that are increasingly developing now. The Central Java Provincial Government has made many efforts to tackle radicalism, one of which is Governor Regulation No. 35 of 2022 and many other efforts have been made. The aim of this research is that provincial government policies have an important role in preventing the spread of radicalism and overcoming asymmetric warfare. Effective policies can help identify and overcome the factors that cause radicalism, as well as strengthen society's resistance to radical ideology. This research uses a qualitative research design and a single case study approach. The data sources used are literature, journals, scientific articles, and also websites that are appropriate to this research. There are many challenges that Central Java Province still has to face to prevent this radicalism*

**Keywords:** *Radicalism; Asymmetric Warfare; Policy; Ideology.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penyebaran Radikalisme yang dimana menjadi penting pada peperangan asimetris. Peperangan asimetris bisa terjadi akibat kemajuan teknologi yang semakin berkembang sekarang. Upaya sudah banyak dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menanggulangi Radikalisme salah satunya dengan Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2022 dan banyak upaya lain yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah Kebijakan pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran radikalisme dan menanggulangi peperangan asimetris. Kebijakan yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ideologi radikal. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus Tunggal. Sumber data yang digunakan menggunakan literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan juga situs-situs yang sesuai dengan penelitian ini. Banyak tantangan yang masih harus dihadapi Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah paham Radikalisme ini.

**Kata kunci:** Radikalisme; Peperangan Asimetris; Kebijakan; Ideologi.

## Pendahuluan

Radikalisme adalah sebuah paham atau gerakan yang menginginkan perubahan secara drastis dan fundamental dalam suatu sistem atau tatanan, baik itu sosial, politik, maupun keagamaan. Radikalisme seringkali dikaitkan dengan penggunaan kekerasan atau cara-cara ekstrem untuk mencapai tujuan mereka. Bahasa Latin radix, yang berarti "akar", dan isme, yang berarti "gerakan", adalah akar etimologis dari kata radikal. Menurut etimologinya, radikalisme merupakan gerakan yang mempunyai landasan yang kuat. Dalam kamus Bahasa Inggris istilah radikal bersinonim "fanatik", "revolusioner", "ekstrim", dan "komprehensif". Radikalisme dapat muncul karena berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau politik yang ada. Selain itu, faktor ideologi, agama, atau sejarah juga dapat mempengaruhi munculnya gerakan radikal.

Radikalisme identik dengan kekerasan, namun tidak semua radikalisme mengarah ke hal-hal negatif tetapi juga dapat bermakna positif. Radikalisme juga menyampaikan penafsiran positif, seperti eksplorasi filsafat ; radikal menandakan pemikiran mendalam, dan radikal merujuk pada analisis kontemplatif yang berlandaskan pada pemikiran tersebut. Pada saat yang sama, kata ini juga dapat mengandung konotasi negatif, seperti yang terlihat dalam konteks fanatisme agama yang mengarah pada pembentukan organisasi teroris.<sup>1</sup> Radikalisme negatif yang muncul dari kepercayaan berbagai agama di Indonesia sama sekali tidak dapat ditoleransi. Radikalisme, selain hubungannya dengan masalah sosial dan politik, juga mencakup ekstremisme agama. Ekstremisme agama merupakan fenomena yang tidak terbatas pada kelompok tertentu; melainkan muncul dalam konteks global. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hampir setiap negara mengalami beberapa bentuk ekstremisme agama, dan bentuk radikalisme ini sering kali melintasi batas agama, yang memengaruhi semua agama yang ada di seluruh dunia,<sup>2</sup> salah satunya di Indonesia juga terdampak dengan kasus maraknya radikalisme di berbebagi tempat.

Akibat meningkatnya intoleransi dan radikalisme, Indonesia saat ini menghadapi sejumlah permasalahan keagamaan yang serius. Kekhawatiran keagamaan ini merujuk pada ketakutan oknum yang beragama muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Islamofobia menjadi

<sup>1</sup> Muhammad Hasyim, Khoirul Anwar, and Misbah Zulfa, "Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren Terhadap Gerakan Radikal," *Jurnal Walisongo* 23, no. 01 (2015): 197–222.

<sup>2</sup> I Ketut Suparta, "Perspektif Radikalisme Dan Deradikalisasi Dalam Bhagawad Gita," *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu* 9, no. 2 (2018): 10–19, <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v9i2.238>.

masalah besar di negara kita.<sup>3</sup> Dengan berbagai macam motivasi, seperti:<sup>4</sup> (i) tribalisme, nasionalisme/separatisme (etnis, nasionalisme/separatisme); (ii) kemiskinan, kesenjangan, dan globalisasi (kemiskinan, kerugian ekonomi, dan globalisasi); (iii) kurangnya demokrasi; (iv) pelanggaran harkat dan martabat manusia (dehumanisasi); dan eksklusivitas agama, radikalisme merupakan gangguan, ancaman, tantangan, dan hambatan bangsa.

Ideologi atau gerakan politik radikal yang menganjurkan reformasi atau pembaruan sosial dan politik dengan cara yang ekstrim atau kekerasan dikenal sebagai radikalisme.<sup>5</sup> Fundamentalisme atau radikalisasi pemikiran keagamaan komunal merupakan hulu dari radikalisme. Hal ini mengembangkan makna Salafisme radikal yang bersifat eksklusif dan seringkali berlebihan (menganggapnya paling benar, dan menyesatkan orang lain). Tindakan terorisme yang menganggap penggunaan taktik kekerasan yang menimbulkan rasa takut dan mengancam masyarakat (ancaman tidak berwujud) sebagai cara yang dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya atas nama agama atau ideologi, merupakan sisi hilir dari radikalisme.<sup>6</sup>

Menurut Platzdasch,<sup>7</sup> keadaan perubahan berpotensi memicu berbagai konflik dan ketidakstabilan sosial politik. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya ekspresi masyarakat melalui media sosial (Facebook, WhatsApp, Twitter, dan jejaring sosial lainnya), termasuk sentimen keagamaan yang dilandasi oleh pernyataan-pernyataan yang dapat dipercaya, di era revolusi industri kontemporer. Perilaku ini juga menimbulkan konflik dan gesekan antar perspektif teologis yang berbeda, sehingga memicu ujaran kebencian dan hoax di dalam organisasi masyarakat. Masa depan generasi muda dan taraf pendidikan di Indonesia sangat terancam dengan kondisi ini, yang turut menanamkan benih-benih radikalisme dan menyebar lebih luas melalui dunia maya.

Penuturan dari Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2023 Ganjar Pranowo, beliau mengatakan setidaknya beliau sudah menindak sekitar tujuh kepala sekolah di Provinsi Jawa Tengah terindikasi dalam jaringan radikalisme yang dimana Ganjar Pranowo melakukan

---

<sup>3</sup> M. Abdul Fattah Santoso and Yayah Khisbiyah, "Islam-Based Peace Education: Values, Program, Reflection and Implication," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (2021): 185–207, <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V11I1.185-207>.

<sup>4</sup> Pranowo Bambang, *Orang Jawa Jadi Teroris*, ed. Pustaka Alfabet (Jakarta, 2011).

<sup>5</sup> Djaka Soetapa, "Asal-Usul Gerakan Fundamentalisme," *Jurnal Ulumul Qur'an* 4, no. 3 (1993).

<sup>6</sup> Syamsul Arifin, "Radikalisasi Paham Keagamaan Komunitas Pesantren," *Jurnal Al-Mawarid* 12, no. 1 (2009): 41–53.

<sup>7</sup> Bernhad Platzdasch, "Islamism in Indonesia: Politics in the Emerging Democracy," *Singapore: Institute of Southeast Asian Studies* 42, no. 2 (2009).

pembinaan untuk kembali ke jalan yang benar.<sup>8</sup> Dunia pendidikan sekarang menjadi target utama dalam penyebaran paham radikalisme, pengamat Radikalisme dan Terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) Tayyip Malik,<sup>9</sup> mengatakan bahwa dunia pendidikan saat ini menjadi target para penyebar paham radikalisme. Paham itu disebarakan melalui mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler hingga bisa saja menempatkan seorang pengajar di sekolah-sekolah dan pondok pesantren.

Wilayah Jawa Tengah saat ini berdasarkan survey yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah memasuki zona merah penyebaran radikalisme dan terorisme.<sup>10</sup> Jawa Tengah dianggap sebagai daerah berisiko tinggi, karena beberapa kejadian menunjukkan bahwa pelaku dan korban berasal dari daerah ini. Selain itu, banyak kelompok yang diyakini memiliki ideologi yang ketat juga muncul di Jawa Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) mengidentifikasi Jawa Tengah sebagai wilayah yang rawan terhadap penyebaran terorisme radikal, sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Risiko Terorisme 2021. Pada tahun 2022, penegak hukum menangkap tujuh orang yang diyakini terlibat dalam terorisme di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Wilayah yang dianggap berisiko tinggi, atau zona merah, adalah Solo, sementara Banjarnegara dan Banyumas diklasifikasikan sebagai zona kuning. Sebaliknya, di wilayah Kedu, hanya ancaman potensial yang diidentifikasi memiliki kapasitas untuk berkembang.<sup>11</sup> Dengan hal ini perlu seluruh komponen masyarakat bersama-sama untuk bertanggungjawab memutus rantai radikalisme di Indonesia. Tidak hanya melalui pendidikan, seluruh sektor pemerintahan dan masyarakat harus menekankan antisipasi untuk membentuk nilai-nilai nasionalisme dan budaya yang ada di masyarakat. Kebijakan pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran radikalisme dan menanggulangi peperangan asimetris. Kebijakan yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ideologi radikal.

Penelitian ini berfokus bagaimana kebijakan yang dahulu maupun hingga saat ini sudah dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi dan mencegah radikalisme

---

<sup>8</sup> Pemprov Jateng, "Ganjar Temukan 7 Kepala Sekolah Diduga Terindikasi Radikalisme," *Jatengprov*, 2019, <https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-temukan-7-kepala-sekolah-diduga-terindikasi-radikalisme/>.

<sup>9</sup> Pemprov Jateng, "Ganjar Diminta Lebih Tegas Lawan Radikalisme," *Jatengprov*, 2019, <https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-diminta-lebih-tegas-lawan-radikalisme/>.

<sup>10</sup> Dede Rosyadi, "Jateng Disebut Salah Satu Daerah Rawan Radikalisme Dan Terorisme," *merdeka*, 2016, <https://www.merdeka.com/peristiwa/jateng-disebut-salah-satu-daerah-rawan-radikalisme-dan-terorisme.html>.

<sup>11</sup> BNPT, "Cegah Penyebaran Paham Radikalisme Di Jawa Tengah, BNPT RI Perkuat Kapasitas & Kompetensi Personel TNI, Polri & Instansi Terkait," *BNPT*, 2023, <https://www.bnpt.go.id/cegah-penyebaran-paham-radikalisme-di-jawa-tengah-bnpt-ri-perkuat-kapasitas-kompetensi-personel-tni-polri-instansi-terkait>.

yang memiliki dampak cukup signifikan dalam segala sektor. Yang dimana radikalisme menjadi salah satu paham yang nantinya berbuat aksi terorisme dan ini menjadi salah satu unsur dari peperangan asimetris yang saat ini menjadi fokus utama yang harus di cegah.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus tunggal. Penelitian terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang telah terjadi (secara historis) pada suatu latar tertentu dikenal dengan istilah studi kasus. Berbagai publikasi, artikel pada jurnal ilmiah, artikel pada surat kabar dan majalah, serta website yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dicakup merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan filosofi postpositivis, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari kondisi objek alam (bukan eksperimen). Peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi (gabungan), analisis data yang digunakan bersifat induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.<sup>12</sup>

## Pembahasan

### A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Mencegah Radikalisme

Kebijakan pemerintah provinsi bervariasi secara signifikan di berbagai wilayah dan konteks, mencerminkan kebutuhan lokal dan struktur tata kelola. Di Indonesia, pemerintah provinsi menerapkan kebijakan pengawasan tenaga kerja yang selaras dengan peraturan pusat tetapi tidak memiliki keseragaman karena perbedaan sosiologis.<sup>13</sup> Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan daerah.

Kebijakan pemerintah provinsi dapat bervariasi tergantung pada isu-isu yang dihadapi, namun umumnya mencakup beberapa bidang utama :<sup>14</sup>

1. Pembangunan Infrastruktur : Termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>13</sup> Endah Pujiastuti, Retno Saraswati, and Lita Tyesta Alw, "Provincial Government Policies in Implementing the Legal Policy of Labor Supervision in Indonesia," *Social Science Research Network*, 2021, <https://doi.org/doi:10.2139/SSRN.3865515>.

<sup>14</sup> Provinsi Jawa Tengah, "Tugas Dan Fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Beserta Unit Di Bawahnya," *jatengprov*, accessed January 13, 2025, <https://jatengprov.go.id/tupoksi-badan-publik/>.

2. Pendidikan : Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dan program bantuan biaya pendidikan.
3. Kesehatan : Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan membangun puskesmas dan rumah sakit.
4. Lingkungan Hidup : Kebijakan ini fokus pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
5. Pemberdayaan Masyarakat : Meliputi program pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha untuk meningkatkan ekonomi lokal.
6. Keamanan dan Ketertiban : Upaya menjaga keamanan publik dan penanganan kejahatan di wilayah tersebut

Selanjutnya perlu ada bagaimana proses pembuatan kebijakan yang meliputi langkah-langkah penting, yaitu :

1. Analisis Kebutuhan : Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Pengembangan Kebijakan : Merumuskan kebijakan yang relevan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
3. Implementasi : Melaksanakan kebijakan dengan melibatkan seluruh staf pemerintah daerah.
4. Evaluasi dan Pengawasan : Memantau pelaksanaan kebijakan untuk memastikan efektivitasnya.

Dari dua aspek diatas maka kembali pada perlu adanya peran penting dari Masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan khususnya di Pemerintah Provinsi. Proses ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, lokakarya, atau media sosial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kebijakan yang mencakup keamanan dan ketertiban bagi seluruh elemen. Yang dimana menjadi salah satu Upaya untuk menangani kejahatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah salah satunya paham radikalisme, mengakibatkan Provinsi Jawa Tengah menjadi suatu wilayah yang masuk ke zona merah.

Paham Radikalisme akan sepenuhnya hilang apabila seluruh elemen Masyarakat dan juga seluruh sektor dari Pemerintah saling membantu dan bekerjasama dalam memberantas paham Radikalisme, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi di Indonesia pasti memiliki atau membuat suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah atau provinsi tersebut salah satunya terkait pemberantasan paham radikalisme.

Masyarakat luas, selain pemerintah atau pihak berwenang harus bahu-membahu mencegah radikalisme. Pencegahan sangatlah penting, baik dalam bentuk kontra radikalisasi, deradikalisasi, atau Kesiapsiagaan Nasional. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (Pepres RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 merupakan salah satu peraturan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah hal tersebut dan mengatasi bahaya radikalisme.

Gubernur Jawa Tengah pada saat itu kepemimpinan Ganjar Pranowo mengeluarkan sebuah aturan yaitu Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah sekaligus menjadi pemimpin dan mengkoordinasikan seluruh lembaga terkait di setiap daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Peraturan Gubernur atau kebijakan lain yang dikeluarkan untuk menanggulangi paham radikalisme di Provinsi Jawa Tengah ini tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program yang tepat sasaran sehingga program-program turunan dari kebijakan yang dibentuk Gubernur dapat dipahami Masyarakat dan dipahami dan diimplementasikan dengan baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng menginisiasi Pusat Pelayanan Cegah Terorisme.<sup>15</sup> Pusat Pelayanan Cegah Terorisme yang dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng berfungsi agar Masyarakat dapat memberikan dan informasi aduan. Keberadaan dari call center Pusat Pelayanan Cegah Terorisme ini diupayakan hingga saat ini dapat mendeteksi dini bahaya radikalisme dan terorisme dan juga upaya dari Provinsi Jawa Tengah untuk menanggulangi meskipun hanya sebuah percikan dari radikalisme.

Program-program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tidak hanya membuat sebuah kebijakan sendiri namun, bekerjasama dengan Lembaga Pemerintahan Pusat. Hal ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah membuat program Penyuluhan Hukum Terpadu Upaya Penanggulangan Paham Terorisme dan Radikalisme

---

<sup>15</sup> Provinsi Jateng, "Tangkal Paham Radikal Dan Teroris, Pemprov Jateng Buka Pusat Layanan Cegah Terorisme," jatengprov, 2022, <https://jatengprov.go.id/publik/tangkal-paham-radikal-dan-teroris-pemprov-jateng-buka-pusat-layanan-cegah-terorisme/>.

Terorisme bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).<sup>16</sup> Penyuluhan Hukum dibentuk sebagai proses cepat untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya agar mendeteksi dini paham radikalisme. Penyuluhan hukum dilakukan secara virtual dan diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dimana WBP ini memiliki akses dengan kontak langsung pelaku terpidana terorisme.

Pada sektor Pendidikan, di tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan Kerjasama dengan Wahid Foundatiin untuk meluncurkan program “Sekolah Damai”. Tujuan Program Sekolah Damai adalah menumbuhkan budaya kerukunan antar siswa dan personel sekolah lainnya. Sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme Tahun 2020–2024, program ini diwajibkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan sekolah-sekolah yang ada dengan menumbuhkan budaya damai, bukan untuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Kebijakan program mendorong pengembangan pola pikir toleran dengan melibatkan siswa secara kreatif, kooperatif, dan interaktif.<sup>17</sup>

Tiga pilar utama Program Sekolah Damai adalah pengelolaan organisasi kesiswaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan anti-ekstremisme, pilar kebijakan sekolah yang pro toleransi dan anti kekerasan, serta pilar praktik toleransi dan perdamaian di kelas dan lingkungan sekolah. Wahid Foundation nantinya akan mengembangkan lebih banyak alat untuk membantu mengelola program, termasuk mengembangkan modul, mengadakan lokakarya, membentuk kelompok kerja, dan menyelenggarakan acara sosial program. Di tahun 2024 ini sudah ada 79 sekolah yang menjadi pionir penggerak Sekolah Damai di Jawa Tengah, yang terdiri dari 44 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan 35 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).<sup>18</sup>

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) menjadi momentum bahwa Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah yang memiliki komitmen penuh dalam menanggulangi Radikalisme dan akhirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI

<sup>16</sup> Humas Kemenkumham Jateng, “Kemenkumham Jateng Gandeng BNPT Sosialisasi Pencegahan Aksi Terorisme,” Jateng Kemenkumham, 2024, <https://jateng.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-jateng-gandeng-bnpt-sosialisasi-pencegahan-aksi-terorisme>.

<sup>17</sup> Nuri Farikhatin, “Wahid Foundation Luncurkan Sekolah Damai Di Jawa Tengah,” NU Online, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/wahid-foundation-luncurkan-sekolah-damai-di-jawa-tengah-jlDxV>.

<sup>18</sup> Wahid Foundation, “PJ Gubernur Jawa Tengah Tunjuk 79 SMA/SMK Menjadi Pionir Sekolah Damai,” WahidFoundation, 2024, <https://wahidfoundation.org/news/detail/pj-gubernur-jawa-tengah-tunjuk-79-smasmk-menjadi-pionir-sekolah-damai>.

memberikan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya dan komitmen yang selama ini sudah dilakukan untuk mencegah paham Radikalisme melalui kebijakan, Pendidikan, ekonomi dan sektor-sektor lain. Menurut penjelasan dari Kesbangpol Provinsi Jateng,<sup>19</sup> meskipun Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan namun kita tetap perlu mewaspadai dikarenakan indeks toleransi berada pada skor 73,69 persen yang dimana masih banyak pihak-pihak yang belum memiliki atau menerapkan rasa toleransi seutuhnya.

Dari banyaknya program-program atau regulasi yang sudah dibentuk serta penghargaan yang didapatkan baiknya kita sebagai Masyarakat khususnya Provinsi Jawa Tengah perlu mengoreksi bahwa kondisi dengan skor tersebut masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Tantangan dalam menghadapi radikalisme juga semakin berat. Internet dan media sosial telah menjadi platform yang efektif bagi kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka, Faktor ekonomi dan sosial salah satunya kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya lapangan kerja dapat menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk bergabung dengan kelompok radikal. Sehingga, kurangnya pemahaman tentang ideologi Pancasila sebagai dasar negara dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap pengaruh ideologi radikal. Oleh karena itu, penanggulangan radikalisme membutuhkan upaya yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu Upaya menanggulangi radikalisme salah satunya di lingkungan sekolah adalah Pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menyusun kurikulum yang menekankan pada nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan keberagaman. Kurikulum ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran seperti PPKN, Sejarah, dan Agama. Termasuk juga Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan BNPT untuk melaksanakan program deradikalisasi bagi narapidana terorisme dan anggota kelompok radikal. Program ini bertujuan untuk mengubah ideologi mereka dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat.

## **B. Peran Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Menanggulangi Peperangan Asimetris**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme merujuk pada suatu aliran pemikiran yang berupaya mengalami transformasi secara signifikan. Istilah revivalisme, Islamisme, integrisme, Islam radikal, dan ekstremisme merupakan sinonim dari istilah

---

<sup>19</sup> Provinsi Jawa Tengah, "Total Perangi Terorisme, Jateng Raih Penghargaan Dari BNPT RI," jatengprov, 2023, <https://jatengprov.go.id/publik/total-perangi-terorisme-jateng-raih-penghargaan-dari-bnpt-ri/>.

radikalisme.<sup>20</sup> Karena banyaknya gerakan radikal yang muncul di banyak wilayah yang sedang melalui fase transisi menuju modernisasi politik, maka radikalisme seperti yang dipahami saat ini selalu dikaitkan dengan radikalisme Islam.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, radikalisme hadir di semua agama dan awalnya muncul di Kristen Protestan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang sejarahnya, terdapat faksi-faksi dalam Islam yang mengambil sikap keras dalam upayanya mendapatkan pengaruh dan kekuasaan politik, namun kenyataannya Islam adalah agama damai yang menentang penggunaan kekerasan dan konflik untuk menyebarkan agama.<sup>22</sup>

Paham Radikalisme menjadi puncak ketakutan Masyarakat dunia dengan adanya peristiwa serangan 9/11. Serangan ini menunjukkan bahwa aktor non-negara (Al-Qaeda) dengan sumber daya yang relatif terbatas dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar pada negara adikuasa. Karena organisasi ekstremis, gerakan Al-Qaeda mendapat perhatian internasional. Pada akhirnya mengakui bahwa gengnya melakukan aksi teror ketika mereka menyerang Pentagon dan World Trade Center, dua simbol penting masyarakat Amerika Serikat. Selain mempengaruhi organisasi teroris lainnya (khususnya kelompok Islam jihad), gerakan Al-Qaeda juga berdampak pada keamanan manusia dan jangkauan global negara tersebut. Osama Bin Laden mendirikan kelompok militan Muslim Sunni Al-Qaeda pada tahun 1980an. Osama Bin Laden, seorang miliarder Timur, memberikan semua sumber daya keuangannya kepada Al-Qaeda. Al-Qaeda memiliki jaringan di 65 negara di seluruh dunia dan sekitar 50.000 orang yang tersebar di seluruh dunia. Jihad melawan “orang-orang kafir” adalah apa yang diklaim Al-Qaeda telah dilakukan dalam serangan 9/11 di Amerika Serikat. Sejak 9/11, Al-Qaeda telah dianggap sebagai kelompok agama transnasional. yang memiliki pengaruh signifikan dalam hubungan internasional, khususnya dalam masalah keamanan, dan kemampuan untuk mempengaruhi negara-negara besar dan negara lain, sehingga menciptakan tatanan global. Al-Qaeda menargetkan dan mengancam orang-orang di seluruh dunia selain Amerika Serikat. Banyak serangan teroris telah dilakukan oleh Al-Qaeda di Timur Tengah, Pakistan, India, Eropa, dan bahkan oleh anggota organisasi yang memperluas cabangnya di Asia Tenggara (seperti pemboman Hotel JW Marriott dan Bali I dan II). Hasil pengejaran Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Osama Bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, pada tahun 2011 membuahkan hasil.

<sup>20</sup> A Abdullah, “Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis,” *Jurnal Addin* 10, no. 1 (2016): 1–28.

<sup>21</sup> A Jainuri, *Radikalisme Dan Terorisme Akar Ideologi Dan Tuntutan Aksi* (Malang: Intrans Publishing, 2016).

<sup>22</sup> O Sinaga, P Ramelan, and I Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia Dinamika Dan Penanggulangannya* (Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2018).

Sebagaimana dimuat dalam CNN edisi 3 Mei 2011, dunia bereaksi cepat terhadap masalah ini sehari setelah Presiden Obama secara resmi menyatakan Osama Bin Laden tewas. Amerika Serikat dan sekutunya memandang hal ini sebagai pencapaian signifikan dalam mencegah serangan teroris yang membahayakan dunia. Afghanistan dan negara-negara Islam lainnya mulai memperjelas bahwa mereka bukanlah negara teroris. Banyak negara menyatakan bahwa mereka tidak memaafkan terorisme, dan mereka akan terus berjuang melawan serangan teroris.<sup>23</sup>

Peperangan Asimetris saat ini menjadi sebuah tren di dunia militer dikarenakan tidak perlunya penerjunan banyak personel militer di wilayah yang akan berperang. Hal ini dikarenakan dampak dari teknologi atau kondisi negara yang kuat sehingga memiliki banyak taktik atau strategi yang digunakan.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin maju dan digitalisasi informasi, yang menjadikan dunia sebagai satu kesatuan tanpa batas waktu dan ruang yang jelas, konsep pertempuran pun berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Upaya lain untuk mengubah opini publik menjadi medan perang telah dilakukan oleh peperangan generasi kelima. Untuk tujuan nasionalnya, sejumlah negara telah memanfaatkan universalitas taktik peperangan kontemporer.

David L. Buffaloe memperkenalkan gagasan perang asimetris pada tahun 2006. "Perang asimetris adalah peperangan non-tradisional yang berpusat pada populasi yang dilakukan antara kekuatan yang lebih unggul secara militer dan satu atau lebih kekuatan yang lebih rendah, yang mencakup semua aspek berikut: mengevaluasi dan mengalahkan ancaman asimetris, melakukan tindakan asimetris. operasi militer, memahami asimetri budaya, dan mengevaluasi biaya yang asimetris," adalah awal mula istilah "perang asimetris" diperkenalkan. Konflik antara pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang tidak merata menjadi fokus peperangan asimetris. Hal ini berarti membandingkan pihak yang lebih lemah (organisasi teroris) dengan pihak yang lebih kuat (negara atau badan keamanan). Menurut gagasan ini, pihak yang lebih lemah dapat menggunakan metode dan teknik tertentu untuk mencapai tujuan mereka.

Peperangan asimetris dapat terjadi melalui udara, laut, darat, atau dunia maya, tergantung pada lingkungannya. Peperangan asimetris lebih lanjut terjadi pada skala nasional, regional, dan dunia, tergantung pada luasnya. Terorisme, bajak laut dan bajak

---

<sup>23</sup> Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani, "Pengaruh Serangan 9/11 Terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional," *Andalas Journal of International Studies* 5, no. 1 (2016).

laut, teror pemberontak, dan keberadaan negara-negara yang melanggar standar internasional merupakan contoh peperangan asimetris dalam skala global. Sengketa wilayah, migrasi internasional, organisasi kriminal internasional, dan kelompok bisnis transnasional merupakan contoh permasalahan yang terjadi di tingkat regional. Sementara itu, ketidakstabilan nasional dan penetrasi asing terjadi pada tingkat nasional.<sup>24</sup>

Sebagai cara untuk memerangi asimetris, yang merupakan fenomena transnasional dan teritorial, ASEAN memungkinkan negara-negara di Asia-Pasifik untuk memberikan pengalaman perjalanan yang inklusif. Komunitas Keamanan ASEAN (ASC) adalah badan pengatur ASEAN. Terkait kontraterorisme, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) didirikan di Cebu, Filipina, pada Januari 2007 dan ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism didirikan di Manila pada September 2017.<sup>25</sup> Terkait keamanan nasional, ada ASEAN Ministerial Meeting tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) dan Rencana Aksi ASEAN dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional (2016-2025).<sup>26</sup>

Paham Radikalisme juga digunakan sebagai taktik dari peperangan asimetris sebagai strategi untuk penyebaran paham ekstrimisme untuk merekrut orang dengan ajakan yang memiliki prinsip-prinsip ekstrim. Hal ini dapat berlanjut kepada aksi terorisme yang saat ini banyak orang memiliki paham bahwa aksi terorisme dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam dan untuk memerangi agama lain. Akan tetapi, itu sebuah paham yang salah karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan dan tidak memiliki unsur kekerasan didalamnya sehingga paham Radikalisme yang mengarah ke aksi Terorisme perlu dicegah sedini mungkin.

Galam dan Brooks mengatakan,<sup>27</sup> Paham Radikalisme sering menggunakan strategi untuk melibatkan taktik konvensional yang mewakili mayoritas tetapi cenderung menghindari konfrontasi. Peperangan Asimetris ini memungkinkan Radikalisme untuk memanfaatkan peluang untuk persuasi dan ekspansi. Dampak dari Radikalisme pada Peperangan Asimetris adalah yang pertama, munculnya platform digital telah mengaburkan batas antara actor dalam peperangan, mengubah warga sipil menjadi aktor dan memperkuat jangkauan narasi radikal. Pergeseran ini memperumit pemahaman

<sup>24</sup> Rod Thornton, "Asymmetric Warfare," *Cambridge: Polity Press*, 2007, 12.

<sup>25</sup> ASEAN, "Asean Convention on Counter Terrorism," n.d., [https://asean.org/?static\\_post=aseanconvention-on-counter-terrorism](https://asean.org/?static_post=aseanconvention-on-counter-terrorism),.

<sup>26</sup> AMMTC, "ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016-2015)," n.d.

<sup>27</sup> Serge Galam and Richard R.W. Brooks, "Radicalism: The Asymmetric Stances of Radicals versus Conventionals," *Physical Review E* 105, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.044112>.

tradisional tentang konflik dan partisipasi. Yang kedua, Kelompok radikal sering kali memanfaatkan ketidakpuasan sosial dan politik untuk merekrut anggota baru dengan menjanjikan identitas dan tujuan bersama. Yang ketiga, Ideologi radikal memberikan legitimasi moral bagi tindakan kekerasan, dengan menganggap musuh sebagai ancaman terhadap nilai-nilai atau kepercayaan mereka. Yang keempat, Kelompok radikal memanfaatkan teknologi modern untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota secara global, memperluas jangkauan mereka meskipun secara fisik mereka mungkin terbatas.<sup>28</sup>

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang memiliki penduduk yang besar di Indonesia pasti ingin memberikan bantuan dan juga memberikan peran bagi Masyarakat untuk mencegah paham radikalisme. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Konflik Sosial. Raperda ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan memperkuat upaya menjaga perdamaian dan keharmonisan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan kasus konflik SARA, yang menunjukkan keberhasilan dalam menjaga ketertiban antar kelompok Masyarakat.<sup>29</sup>

Provinsi Jawa Tengah, dalam upaya deradikalisasi mantan narapidana terorisme. Ini penting karena radikalisme dan terorisme seringkali merupakan bagian dari peperangan asimetris. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berupa program rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan narapidana terorisme. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme juga penting.

Salah satu elemen pemerintah dari Tentara Nasional Indonesia yaitu Kodam IV/Diponegoro yang berdiri di Provinsi Jawa Tengah juga berperan penting dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah, yang merupakan daerah dengan tingkat penyebaran ancaman cukup tinggi. Kodam IV/Diponegoro sebagai salah satu elemen penting dari Tentara Nasional Indonesia memberikan dukungan berupa

---

<sup>28</sup> Tjandra Ariwibowo, Lukman Yudho Prakoso, and Helda Risman, "Strategi Perang Semesta Melalui Optimalisasi Nilai-Nilai Pancasila Menghadapi Radikalisme Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Strategi Perang Semesta* 7 (2021): 58–71.

<sup>29</sup> Kesbangpol Jateng, "Raperda Penanganan Konflik Sosial: Langkah Strategis Untuk Mewujudkan Kehidupan Damai Di Jawa Tengah," Kesbangpol Jateng, 2023, <https://kesbangpol.jatengprov.go.id/new2/publik/berita/MThiZTU4OTMxMmYyMzQ0NmQyNDEwNmUxOGVhOTEzYjRhYzAyM2ViYTE0MzA2ZTcyNDY1ZDgyMWYwZDE3MjY2>.

sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menangani masalah ini. Namun, peran mereka masih perlu dioptimalkan melalui dukungan dari pemerintah daerah dan pusat.<sup>30</sup>

Kodam IV/Diponegoro memiliki peran penting dalam menangani radikalisme di Jawa Tengah melalui berbagai strategi, seperti analisis ancaman, penyediaan sumber daya, pendidikan masyarakat, dan sosialisasi deteksi dini bekerja sama dengan BNPT. Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Rudianto, penekanan pentingnya pendidikan generasi muda agar tidak mempengaruhi paham radikal dan mengajak masyarakat bersinergi dalam memerangi radikalisme<sup>31</sup>. Selain itu, Kodam IV/Diponegoro juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan instansi terkait untuk pengawasan dan pencegahan penyebaran paham radikal. Namun, mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kesulitan deteksi dini, dan perubahan dinamika sosial yang mempengaruhi penyebaran radikalisme. Dengan pendekatan yang melibatkan kolaborasi antarinstansi dan edukasi masyarakat, Kodam IV/Diponegoro terus berupaya menjaga stabilitas keamanan nasional meskipun masih diperlukan optimalisasi peran untuk menghadapi tantangan yang ada.

Keterlibatan Kodam IV/Diponegoro dalam pencegahan radikalisme di Jawa Tengah dapat dilihat dari perspektif hukum dan dampaknya terhadap reformasi hukum yang berorientasi pada masyarakat sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kodam IV/Diponegoro memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindakan terorisme dan radikalisme, termasuk melalui pendekatan pendekatan keras yang melibatkan penangkapan pelaku teror. Namun, pendekatan ini sering kali dibahas dalam konteks reformasi hukum yang lebih mengedepankan hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat sipil. Pendekatan pendekatan lembut, yang melibatkan edukasi dan dialog dengan masyarakat, juga penting untuk membangun kesadaran akan bahaya radikalisme tanpa menggunakan kekerasan, sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi hukum yang berorientasi pada masyarakat sipil. Oleh karena itu, meskipun keterlibatan Kodam IV/Diponegoro dalam penanganan radikalisme memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya harus sejalan dengan upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan

---

<sup>30</sup> Patricia Narulita Prajogo, Rizerius Eko Hadisancoko, and Pujo Widodo, "PERAN STRATEGIS KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) IV/DIPONEGORO DALAM MENGATASI ANCAMAN TERORISME DAN RADIKALISME GUNA MENDUKUNG KEDAULATAN NEGARA," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 2023.

<sup>31</sup> Baihaqi Annizar, "Kodam IV/Diponegoro Cegah Penyebaran Radikalisme Di Jateng-DIY," *Jatengtoday*, 2022, <https://jatengtoday.com/kodam-iv-diponegoro-cegah-penyebaran-radikalisme-di-jateng-diy>.

menghormati hak asasi manusia agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi hukum yang lebih luas.<sup>32</sup>

Partisipasi Masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak disertai adanya peran dari Pemerintah Provinsi dan turunannya. Peperangan asimetris saat ini dapat dilakukan melalui propaganda media dengan menyebarkan paham radikalisme. Peran Pemimpin Daerah seperti Gubernur memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan kebijakan dan program-program pemerintah pusat yang relevan dengan penanggulangan ancaman, termasuk yang bersifat asimetris.

Upaya meningkatkan edukasi masyarakat juga menjadi fokus utama dalam menghadapi peperangan asimetris. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program yang menumbuhkan rasa bela negara dan kesadaran akan pentingnya perlindungan. Seminar-seminar nasional diadakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai konsep perlindungan Indonesia sebagai negara kepulauan. Keberhasilan dalam menangani peperangan asimetris sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat. Seminar-seminar yang melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan memberikan ruang bagi pertukaran pengalaman dan pengetahuan dalam menangani konflik sosial. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

## **Penutup**

Implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah radikalisme mencakup upaya komprehensif seperti pendirian Pusat Pelayanan Cegah Terorisme untuk deteksi dini, landasan hukum melalui Pergub Nomor 35 Tahun 2022, koordinasi dengan BNPT dan instansi terkait, program deradikalisasi dan pembinaan mantan narapidana terorisme dan simpatisan, serta pelibatan aktif masyarakat. Sementara itu, peran kebijakan Pemprov dalam menanggulangi peperangan asimetris bersifat implisit, terkait erat dengan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui peningkatan ketahanan masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan, koordinasi dengan berbagai lembaga intelijen dan keamanan, serta kepemimpinan daerah dalam komunikasi publik dan pembangunan narasi kontra radikalisme. Kedua upaya ini saling berkaitan, dimana pencegahan radikalisme berkontribusi pada penanggulangan potensi ancaman asimetris secara lebih luas. Namun, masih banyak tantangan yang harus dilakukan bersama-sama dengan adanya skor toleransi

---

<sup>32</sup> BNPT, *MODUL PENGETAHUAN DASAR KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENANGGULANGAN TERORISME*, Cetakan Pe (Bogor: BNPT, 2021).

yang menyentuh angka 73,69 persen menjadi bukti bahwa Masyarakat dan lembaga pemerintah provinsi Jawa Tengah perlu bersama sama untuk menanggulangi radikalisme agar menyentuh skor sempurna dan menciptakan lingkungan yang terbebas dari paham radikalisme dan mencegah peperangan asimetris di Indonesia.

## Referensi

- Abdullah, A. “Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis.” *Jurnal Addin* 10, no. 1 (2016): 1–28.
- AMMTC. “ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016-2015),” n.d.
- Annizar, Baihaqi. “Kodam IV/Diponegoro Cegah Penyebaran Radikalisme Di Jateng-DIY.” *Jatengtoday*, 2022. <https://jatengtoday.com/kodam-iv-diponegoro-cegah-penyebaran-radikalisme-di-jateng-diy>.
- Arifin, Syamsul. “Radikalisasi Paham Keagamaan Komunitas Pesantren.” *Jurnal Al-Mawarid* 12, no. 1 (2009): 41–53.
- Ariwibowo, Tjandra, Lukman Yudho Prakoso, and Helda Risman. “Strategi Perang Semesta Melalui Optimalisasi Nilai-Nilai Pancasila Menghadapi Radikalisme Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Strategi Perang Semesta* 7 (2021): 58–71.
- ASEAN. “Asean Convention on Counter Terrorism,” n.d. [https://asean.org/?static\\_post=aseanconvention-on-counter-terrorism](https://asean.org/?static_post=aseanconvention-on-counter-terrorism).
- Bambang, Pranowo. *Orang Jawa Jadi Teroris*. Edited by Pustaka Alfabet. Jakarta, 2011.
- Bambang, P. (2011). *Orang Jawa Jadi Teroris* (Pustaka Alfabet (ed.)).
- BNPT. “Cegah Penyebaran Paham Radikalisme Di Jawa Tengah, BNPT RI Perkuat Kapasitas & Kompetensi Personel TNI, Polri & Instansi Terkait.” BNPT, 2023. <https://www.bnpt.go.id/cegah-penyebaran-paham-radikalisme-di-jawa-tengah-bnpt-ri-perkuat-kapasitas-kompetensi-personel-tni-polri-instansi-terkait>.
- . *MODUL PENGETAHUAN DASAR KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENANGGULANGAN TERORISME*. Cetakan Pe. Bogor: BNPT, 2021.
- Farikhatin, Nuri. “Wahid Foundation Luncurkan Sekolah Damai Di Jawa Tengah.” NU Online, 2022. <https://www.nu.or.id/nasional/wahid-foundation-luncurkan-sekolah-damai-di-jawa-tengah-jlDxV>.
- Foundation, Wahid. “PJ Gubernur Jawa Tengah Tunjuk 79 SMA/SMK Menjadi Pionir Sekolah Damai.” WahidFoundation, 2024. <https://wahidfoundation.org/news/detail/pj-gubernur-jawa-tengah-tunjuk-79-smasmk-menjadi-pionir-sekolah-damai>.
- Galam, Serge, and Richard R.W. Brooks. “Radicalism: The Asymmetric Stances of Radicals versus Conventionals.” *Physical Review E* 105, no. 4 (2022).
- Galang Setyawan Aji, Mochammad Afifuddin, Ahmad G. Dohamid| Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme sebagai Upaya Menanggulangi Peperangan Asimetris

<https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.044112>.

Hasyim, Muhammad, Khoirul Anwar, and Misbah Zulfa. "Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren Terhadap Gerakan Radikal." *Jurnal Walisongo* 23, no. 01 (2015): 197–222.

Jainuri, A. *Radikalisme Dan Terorisme Akar Ideologi Dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing, 2016.

Jateng, Kesbangpol. "Raperda Penanganan Konflik Sosial: Langkah Strategis Untuk Mewujudkan Kehidupan Damai Di Jawa Tengah." Kesbangpol Jateng, 2023. <https://kesbangpol.jatengprov.go.id/new2/publik/berita/MThiZTU4OTMxMmYyMzQ0NmQyNDEwNmUxOGVhOTEzYjRhYzAyM2ViYTE0MzA2ZTcyNDY1ZDgyMWYwZDE3MjY2>.

Jateng, Pemprov. "Ganjar Diminta Lebih Tegas Lawan Radikalisme." Jatengprov, 2019. <https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-diminta-lebih-tegas-lawan-radikalisme/>.

———. "Ganjar Temukan 7 Kepala Sekolah Diduga Terindikasi Radikalisme." Jatengprov, 2019. <https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-temukan-7-kepala-sekolah-diduga-terindikasi-radikalisme/>.

Jateng, Provinsi. "Tangkal Paham Radikal Dan Teroris, Pemprov Jateng Buka Pusat Layanan Cegah Terorisme." jatengprov, 2022. <https://jatengprov.go.id/publik/tangkal-paham-radikal-dan-teroris-pemprov-jateng-buka-pusat-layanan-cegah-terorisme/>.

Jawa Tengah, Provinsi. "Total Perangi Terorisme, Jateng Raih Penghargaan Dari BNPT RI." jatengprov, 2023. <https://jatengprov.go.id/publik/total-perangi-terorisme-jateng-raih-penghargaan-dari-bnpt-ri/>.

———. "Tugas Dan Fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Beserta Unit Di Bawahnya." jatengprov. Accessed January 13, 2025. <https://jatengprov.go.id/tupoksi-badan-publik/>.

Kemenkumham Jateng, Humas. "Kemenkumham Jateng Gandeng BNPT Sosialisasi Pencegahan Aksi Terorisme." Jateng Kemenkumham, 2024. <https://jateng.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-jateng-gandeng-bnpt-sosialisasi-pencegahan-aksi-terorisme>.

Payani, Ni Luh Bayu Purwa Eka. "Pengaruh Serangan 9/11 Terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional." *Andalas Journal of International Studies* 5, no. 1 (2016).

Platzdasch, Bernhad. "Islamism in Indonesia: Politics in the Emerging Democracy." *Singapore: Institute of Southeast Asian Studies* 42, no. 2 (2009).

Prajogo, Patricia Narulita, Rizerius Eko Hadisancoko, and Pujo Widodo. "PERAN STRATEGIS KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) IV/DIPONEGORO DALAM MENGATASI ANCAMAN TERORISME DAN RADIKALISME GUNA MENDUKUNG KEDAULATAN NEGARA." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 2023.

Galang Setyawan Aji, Mochammad Afifuddin, Ahmad G. Dohamid| Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme sebagai Upaya Menanggulangi Peperangan Asimetris

- Pujiastuti, Endah, Retno Saraswati, and Lita Tyesta Alw. "Provincial Government Policies in Implementing the Legal Policy of Labor Supervision in Indonesia." *Social Science Research Network*, 2021. <https://doi.org/doi: 10.2139/SSRN.3865515>.
- Rosyadi, Dede. "Jateng Disebut Salah Satu Daerah Rawan Radikalisme Dan Terorisme." merdeka, 2016. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jateng-disebut-salah-satu-daerah-rawan-radikalisme-dan-terorisme.html>.
- Santoso, M. Abdul Fattah, and Yayah Khisbiyah. "Islam-Based Peace Education: Values, Program, Reflection and Implication." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (2021): 185–207. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V11I1.185-207>.
- Sinaga, O, P Ramelan, and I Montratama. *Terorisme Kanan Indonesia Dinamika Dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2018.
- Soetapa, Djaka. "Asal-Usul Gerakan Fundamentalisme." *Jurnal Ulumul Qur'an* 4, no. 3 (1993).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suparta, I Ketut. "Perspektif Radikalisme Dan Deradikalisasi Dalam Bhagawad Gita." *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu* 9, no. 2 (2018): 10–19. <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v9i2.238>.
- Thornton, Rod. "Asymmetric Warfare." *Cambridge: Polity Press*, 2007.
- Sinaga, O., Ramelan, P., & Montratama, I. (2018). *Terorisme Kanan Indonesia Dinamika Dan Penanggulangannya*. PT. Elex Media Komputido.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Thornton, R. (2007). *Asymmetric Warfare*. *Cambridge: Polity Press*.